



LAPORAN KEBERLANJUTAN

Dana Pensiun Lembaga Keuangan bank bjb

2025

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| DAFTAR ISI | i |
| TENTANG LAPORAN KEBERLANJUTAN | 1 |
| 1. Latar Belakang..... | 1 |
| 2. Periode Pelaporan | 2 |
| 3. Ruang Lingkup dan Batasan | 3 |
| 4. Dasar, Standar, dan Pendekatan Penyusunan..... | 4 |
| IKHTISAR KINERJA ASPEK KEBERLANJUTAN | 4 |
| 1. Aspek Ekonomi | 5 |
| 2. Aspek Lingkungan Hidup | 6 |
| 3. Aspek Sosial | 6 |
| BAB III – PROFIL PERUSAHAAN | 8 |
| 1. Gambaran Umum Perusahaan..... | 8 |
| 2. Skala Usaha | 9 |
| 3. Produk, Layanan, dan Kegiatan Usaha | 11 |
| 4. Keanggotaan dan Afiliasi | 12 |
| 5. Visi dan Misi Dana Pensiun Lembaga Keuangan | 11 |
| 6. Core Values | 13 |
| 7. Nilai Berkelanjutan | 14 |
| PENJELASAN PENGURUS | 16 |
| 1. Kebijakan Merespon Tantangan dalam Pemenuhan Strategi Keberlanjutan | 16 |
| 2. Penerapan Keuangan Berkelanjutan | 24 |
| TATA KELOLA KEBERLANJUTAN | 21 |
| 1. Struktur Tanggung Jawab Penerapan Keuangan Berkelanjutan | 22 |
| 2. Pengembangan Kompetensi Keberlanjutan | 24 |
| 4. Manajemen Risiko Berkelanjutan | 24 |
| 5. Pemangku Kepentingan | 25 |
| 6. Permasalahan, Perkembangan, dan Pengaruh | 27 |
| BKINERJA KEBERLANJUTAN | 28 |
| 1. Budaya Keberlanjutan | 29 |
| 2. Kinerja Ekonomi..... | 30 |
| 3. Kinerja Sosial | 33 |
| 4. Kinerja Lingkungan | 39 |

TENTANG LAPORAN KEBERLANJUTAN

1. Latar Belakang

Perubahan lanskap ekonomi dan keuangan global dalam beberapa tahun terakhir mendorong meningkatnya perhatian terhadap bagaimana aktivitas ekonomi dijalankan secara lebih bertanggung jawab dan berorientasi jangka panjang. Isu-isu seperti perubahan iklim, ketimpangan sosial, serta ketahanan sistem keuangan menjadi faktor yang semakin diperhitungkan dalam pengambilan keputusan, termasuk oleh lembaga jasa keuangan. Dalam konteks tersebut, konsep pembangunan berkelanjutan tidak lagi dipandang sebagai isu normatif, melainkan telah menjadi bagian dari kerangka kerja global yang terstruktur melalui *Sustainable Development Goals (SDGs)* sebagai kerangka global yang mencakup 17 (tujuh belas) tujuan dan 169 (seratus enam puluh Sembilan) target yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan hingga tahun 2030. *SDGs* menjadi acuan dan memberikan arah bagi berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor keuangan, untuk berkontribusi dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menjaga keseimbangan lingkungan, serta memperkuat tata kelola yang baik. Peran sektor keuangan dalam mendukung pencapaian *SDGs* sangat penting dalam mengarahkan aliran dana menuju kegiatan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karenanya, konsep *sustainable finance* dikembangkan sebagai upaya untuk mengintegrasikan integrasi aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola atau yang dikenal dengan *Environmental, Social, and Governance (ESG)*.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, regulator di Indonesia telah mendorong penerapan Keuangan Berkelanjutan melalui berbagai kebijakan, termasuk kewajiban penyusunan Laporan Keberlanjutan bagi lembaga jasa keuangan. Kebijakan ini menekankan pentingnya transparansi dalam mengungkapkan kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta bagaimana organisasi mengelola dampak yang ditimbulkan dari kegiatan usahanya. Penerapan Keuangan Berkelanjutan di Indonesia diatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Peraturan

tersebut mendorong lembaga jasa keuangan untuk secara bertahap mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam kegiatan usahanya, termasuk melalui penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan dan Laporan Keberlanjutan sebagai bentuk transparansi kepada pemangku kepentingan.

Dalam konteks industri dana pensiun, relevansi penerapan Keuangan Berkelanjutan sangat kuat seiring dengan karakteristik pengelolaan dana yang berorientasi jangka panjang. Pengelolaan dana pensiun tidak hanya ditujukan untuk menghasilkan imbal hasil yang optimal, tetapi juga untuk memastikan keberlanjutan manfaat bagi peserta. Oleh karena itu, pertimbangan terhadap risiko dan peluang yang berkaitan dengan aspek *ESG* menjadi semakin relevan dan penting dalam pengelolaan dana pensiun. DPLK bank **bjb** sebagai Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti memiliki peran dalam mendukung pengelolaan dana yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Sejalan dengan ketentuan yang berlaku, DPLK bank **bjb** telah menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) sebagai langkah awal dalam menentukan arah dan prioritas penerapan Keuangan Berkelanjutan. Sehubungan dengan hal tersebut, Laporan Keberlanjutan ini disusun sebagai bentuk pemenuhan kewajiban regulasi sekaligus sebagai sarana untuk menyampaikan kepada pemangku kepentingan mengenai pendekatan, arah kebijakan, serta langkah awal yang dilakukan oleh DPLK bank **bjb** dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan.

2. Periode Pelaporan

Sejalan dengan pemenuhan kewajiban dari regulator, DPLK bank **bjb** untuk pertama kalinya menyusun Laporan Keberlanjutan yang mencakup periode pelaporan tahun buku 2025 sebagai sarana untuk memberikan gambaran awal mengenai pendekatan dan langkah yang dilakukan dalam mengintegrasikan aspek keberlanjutan ke dalam kegiatan usaha dan bagian dari pemenuhan ketentuan regulasi. Selanjutnya penyusunan Laporan Keberlanjutan akan dilakukan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Ruang Lingkup dan Batasan

Laporan Keberlanjutan ini memuat informasi mengenai penerapan Keuangan Berkelanjutan di DPLK bank **bjb** pada periode pelaporan tahun 2025, yang mencakup aspek strategi, tata kelola, serta langkah awal implementasi dalam kegiatan usaha. Ruang lingkup laporan disusun dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017, serta diselaraskan dengan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) DPLK bank **bjb** yang telah disusun sebelumnya sebagai dasar arah penerapan Keuangan Berkelanjutan. Sejalan dengan hal tersebut, laporan ini juga merupakan bagian dari tindak lanjut atas Laporan RAKB, yang menggambarkan perkembangan awal pelaksanaan rencana aksi yang telah ditetapkan, khususnya pada periode awal implementasi riset (pemantauan pasar) penentuan parameter *green bond*, serta pelaksanaan kajian dan pemantauan terhadap perkembangan instrumen keuangan berkelanjutan sebagai bagian dari proses pembentukan fondasi penerapan Keuangan Berkelanjutan. Adapun batasan laporan ditetapkan dengan mempertimbangkan ketersediaan data hingga relevansi terhadap kegiatan usaha.

Beberapa aspek yang memiliki dampak langsung yang terbatas, khususnya terkait lingkungan hidup, diungkapkan secara proporsional sesuai dengan karakteristik operasional DPLK bank **bjb** yang tidak memiliki kegiatan berbasis produksi atau eksploitasi sumber daya alam. Selain itu, laporan ini belum mencakup seluruh indikator keberlanjutan secara komprehensif, terutama yang memerlukan sistem pengukuran yang lebih lanjut, seperti penghitungan emisi secara rinci atau pengungkapan portofolio investasi berbasis ESG. Keterbatasan ini merupakan bagian dari proses pengembangan penerapan Keuangan Berkelanjutan yang dilakukan secara bertahap.

Periode pelaporan mencakup kinerja DPLK bank **bjb** untuk tahun buku 2025, dengan penyajian data komparatif untuk beberapa indikator dalam tiga tahun terakhir sepanjang data tersedia. Dengan demikian, ruang lingkup dan batasan laporan ini disusun untuk memberikan gambaran yang relevan, transparan, dan proporsional mengenai kinerja keberlanjutan DPLK bank **bjb**, dengan tetap memperhatikan tahap implementasi serta karakteristik kegiatan usaha yang dijalankan. Dalam konteks tersebut, strategi

keberlanjutan DPLK bank **bjb** diarahkan pada integrasi prinsip Keuangan Berkelanjutan ke dalam kegiatan usaha secara bertahap, dengan mempertimbangkan karakteristik DPLK sebagai pengelola dana pensiun jangka panjang, melalui penguatan tata kelola, pengelolaan risiko yang memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG), pengembangan kajian investasi berkelanjutan, serta peningkatan kontribusi terhadap aspek sosial dan efisiensi operasional.

4. Dasar, Standar, dan Pendekatan Penyusunan

Laporan Keberlanjutan ini disusun dengan mengacu pada:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017;
2. Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) DPLK bank **bjb** periode tahun 2025;
3. Praktik dan referensi pelaporan keberlanjutan yang berlaku secara umum.

Pendekatan penyusunan laporan dilakukan secara deskriptif dengan mengacu pada data dan informasi yang tersedia pada periode pelaporan, yang diperoleh dari grup terkait di lingkungan DPLK bank **bjb**. Mengingat penerapan Keuangan Berkelanjutan masih berada pada tahap awal, penyajian informasi dalam laporan ini sebagian besar berfokus pada penjelasan mengenai arah strategi, tata kelola, serta langkah awal implementasi yang dilakukan, khususnya mengenai penentuan parameter *green bond*.

Selanjutnya penyusunan Laporan Keberlanjutan akan terus dikembangkan secara bertahap, termasuk melalui penguatan pengukuran kinerja, peningkatan kualitas data, serta penyempurnaan pengungkapan informasi sesuai dengan perkembangan regulasi dan praktik pelaporan yang berlaku.

IKHTISAR KINERJA ASPEK KEBERLANJUTAN

1. Aspek Ekonomi

Dalam konteks keberlanjutan, kinerja ekonomi tidak hanya dilihat dari indikator keuangan semata, tetapi juga dari bagaimana organisasi menciptakan nilai secara berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya dan layanan yang bertanggung jawab. DPLK Bank **bjb** secara berkelanjutan berupaya menghadirkan inovasi dalam pengelolaan program dana pensiun yang relevan, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan peserta dari berbagai segmen. Pengembangan jaringan distribusi dan layanan juga terus diperkuat agar produk dana pensiun dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas, efektif, dan inklusif.

Dalam aktivitas investasinya, DPLK bank **bjb** mengedepankan prinsip investasi yang prudent dan bertanggung jawab dengan mempertimbangkan aspek risiko, imbal hasil, serta keberlanjutan dalam jangka panjang. Melalui pendekatan tersebut, DPLK bank **bjb** berkomitmen untuk menciptakan nilai ekonomi yang berkelanjutan, sekaligus memberikan manfaat optimal bagi peserta, pemberi kerja, serta seluruh pemangku kepentingan. Dari sisi kuantitas jasa yang diberikan, DPLK bank **bjb** terus melaksanakan layanan pengelolaan dana pensiun kepada peserta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun dari sisi pendapatan dan hasil usaha, kinerja keuangan mencerminkan hasil pengelolaan dana serta kegiatan operasional yang dilakukan selama periode tersebut. Informasi terkait pendapatan, hasil usaha, serta indikator keuangan lainnya disajikan berdasarkan laporan keuangan DPLK bank **bjb** dalam periode pelaporan.

Berikut kinerja keuangan DPLK bank **bjb**:

| Indikator | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Jumlah Peserta (orang) | 164.794 | 198.681 | 218.454 |
| Dana Kelolaan (Rp.) | 1,410,367,564,820 | 1,863,369,652,421 | 2,143,590,891,710 |
| Pendapatan (Rp.) | 16,954,305,861 | 21,050,141,808 | 23,760,105,334 |

2. Aspek Lingkungan Hidup

DPLK Bank **bjb** mendukung upaya pengurangan dampak lingkungan melalui penerapan praktik operasional yang lebih efisien dan ramah lingkungan, termasuk pengurangan penggunaan kertas, optimalisasi proses digital, serta peningkatan efisiensi energi dalam kegiatan operasional. Inisiatif ini dilakukan sebagai bagian dari transformasi menuju proses bisnis yang lebih berkelanjutan. Sehingga dalam kegiatan investasi, DPLK bank **bjb** juga memperhatikan aspek ESG sebagai salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi, dengan tujuan untuk mendukung pembiayaan pada instrumen dan sektor yang memiliki dampak positif terhadap lingkungan. Selain itu, DPLK Bank **bjb** terus mendorong peningkatan kesadaran internal terkait pentingnya pelestarian lingkungan melalui berbagai inisiatif sederhana namun berkelanjutan, sebagai bentuk kontribusi terhadap mitigasi perubahan iklim dan pencapaian pembangunan berkelanjutan.

Dalam tiga tahun terakhir, penggunaan energi DPLK bank **bjb** terutama berasal dari konsumsi listrik dan air untuk kegiatan operasional sehari-hari, yang dikelola oleh Pendiri. Sementara itu, dari sisi emisi, limbah, dan efluen, dampak yang dihasilkan relatif terbatas dan tidak bersifat material, sehingga pengungkapan masih disesuaikan dengan karakteristik usaha..

3. Aspek Sosial

DPLK bank **bjb** berkomitmen untuk memberikan kontribusi sosial melalui penyediaan program dana pensiun yang inklusif, mudah diakses, serta mampu mendukung peningkatan kesejahteraan peserta di masa pensiun. Upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan juga terus dilakukan agar masyarakat semakin memahami pentingnya perencanaan keuangan jangka panjang. Selain itu, DPLK bank **bjb** secara aktif mendorong edukasi dan sosialisasi mengenai manfaat program pensiun melalui berbagai kegiatan kepada peserta, pemberi kerja, maupun masyarakat umum. Hal ini bertujuan untuk memperluas pemahaman serta meningkatkan partisipasi dalam program dana pensiun.

DPLK bank **bjb** juga berupaya membangun hubungan yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan melalui layanan yang responsif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan peserta, sehingga dapat menciptakan nilai sosial yang berkelanjutan. Dari sisi dampak positif, penyelenggaraan program pensiun dan layanan kepesertaan berkontribusi pada peningkatan perencanaan keuangan jangka panjang, pengurangan risiko kemiskinan di usia lanjut, serta peningkatan akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Selain itu, DPLK bank **bjb** juga mendukung literasi dan inklusi keuangan melalui edukasi mengenai pentingnya program pensiun. Dari sisi internal, aspek sosial tercermin dalam penyediaan lingkungan kerja yang layak, kesempatan kerja yang setara, serta pengembangan kapasitas pegawai.

Adapun dari sisi potensi dampak negatif, implementasi keuangan berkelanjutan, termasuk investasi pada *green bond*, masih menghadapi keterbatasan dalam pengukuran dampak sosial yang komprehensif serta belum meratanya akses terhadap manfaat yang dihasilkan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan indikator dan pelaporan dampak sosial agar manfaat yang dihasilkan dapat lebih terukur dan inklusif. Secara keseluruhan, aspek sosial menunjukkan bahwa penerapan keuangan berkelanjutan tidak hanya memberikan manfaat ekonomi dan lingkungan, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, inklusivitas, dan perlindungan sosial secara berkelanjutan

PROFIL PERUSAHAAN

1. Gambaran Umum Perusahaan

DPLK bank **bjb** merupakan lembaga yang menyelenggarakan Program Pensiun luran Pasti yang didirikan oleh bank **bjb** sebagai Pendiri. DPLK bank **bjb** hadir sebagai salah satu sarana bagi masyarakat, baik individu maupun kelompok, untuk mempersiapkan kesejahteraan finansial pada masa pensiun. Dalam menjalankan kegiatannya, DPLK bank **bjb** berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun, serta kebijakan internal yang berlaku di lingkungan bank **bjb** sebagai Pendiri. Karakteristik usaha dana pensiun yang berorientasi jangka panjang menjadikan pengelolaan dana dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian serta kesinambungan manfaat bagi peserta.

Sebagai bagian dari identitas kelembagaan, DPLK bank **bjb** memiliki informasi umum yang digunakan sebagai sarana komunikasi dengan peserta dan pemangku kepentingan. Informasi tersebut meliputi nama perusahaan, alamat kantor pusat, nomor telepon, nomor faksimil, alamat surat elektronik (e-mail), serta situs web resmi yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi terkait layanan dan kegiatan usaha DPLK bank **bjb**.

Adapun informasi umum DPLK bank **bjb** adalah sebagai berikut:

1. Nama Perusahaan : Dana Pensiun Lembaga Keuangan bank **bjb** (DPLK bank **bjb**)
2. Alamat Pendiri : Jl. Naripan No 12 – 14 Bandung
3. Alamat Dana Pensiun : Jl. Kejaksaan No 8 – 10 Bandung
4. Nomor Telepon : 022 – 4211233
5. Nomor Faksimil : -
6. Alamat *e-mail* : dplkbjb@gmail.com dan groupofdplk@bankbjb.co.id
Situs Web : dplk.bankbjb.co.id

2. Skala Usaha

Skala usaha DPLK bank **bjb** dapat dilihat dari beberapa indikator utama, antara lain total aset yang dikelola, jumlah peserta, serta sumber daya manusia yang mendukung kegiatan operasional. Informasi mengenai skala usaha ini disajikan untuk memberikan gambaran umum mengenai kondisi keuangan, sumber daya manusia, serta cakupan operasional DPLK bank **bjb** pada periode pelaporan.

1. Total Aset dan Total Kewajiban

Total aset dan kewajiban DPLK bank **bjb** dalam tiga tahun terakhir menunjukkan perkembangan kapasitas pengelolaan dana serta posisi keuangan organisasi.

| Indikator | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Total Aset | 1.407.323.076.121 | 1.863.711.755.464 | 2.215.032.164.233 |
| Total Kewajiban | 1.407.323.076.121 | 1.863.711.755.464 | 2.142.176.811.792 |

Nilai aset mencerminkan total dana kelolaan yang dikelola untuk kepentingan peserta, sementara kewajiban mencerminkan kewajiban manfaat yang harus dipenuhi oleh DPLK bank **bjb**.

2. Jumlah Pegawai

Jumlah pegawai DPLK bank **bjb** merupakan salah satu indikator yang menggambarkan kapasitas operasional organisasi dalam menjalankan kegiatan usaha.

| Indikator | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------|------|------|------|
| Jumlah Pegawai | 23 | 23 | 26 |

3. Komposisi Pegawai

a. Berdasarkan Jenis Kelamin

| Jenis Kelamin | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------|------|------|------|
| Laki-laki | 13 | 13 | 16 |
| Perempuan | 10 | 10 | 10 |

b. Berdasarkan Jabatan

| Jabatan | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------|------|------|------|
| Manajerial | 4 | 4 | 4 |
| Non Manajerial | 19 | 19 | 22 |

c. Berdasarkan Usia

| Kelompok Usia | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------|------|------|------|
| <30 Tahun | 1 | 2 | 2 |
| 30 – 50 Tahun | 22 | 21 | 24 |
| >50 Tahun | - | - | - |

d. Berdasarkan Pendidikan

| Tingkat Pendidikan | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|------|------|------|
| SMA/ sederajat | - | - | - |
| Diploma | 2 | - | - |
| Sarjana | 15 | 17 | 21 |
| Pascasarjana | 6 | 5 | 5 |

e. Berdasarkan Status Ketenagakerjaan

| Status | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|------|
| Pegawai Tetap | 23 | 23 | 24 |
| Pegawai Tidak Tetap | - | - | - |
| Tenaga Alih Daya | - | - | - |

f. Wilayah Operasional

DPLK bank **bjb** menjalankan kegiatan usaha dengan cakupan wilayah operasional yang terintegrasi dengan jaringan pendiri, sehingga memungkinkan pelayanan kepada peserta dilakukan secara lebih luas dan efisien.

| Indikator | Keterangan |
|---------------|------------|
| Kantor Pusat | 1 |
| Kantor Cabang | 64 |

Terkait dengan kepemilikan, DPLK bank **bjb** merupakan Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang didirikan oleh bank **bjb** sebagai Pendiri, sehingga tidak terdapat kepemilikan saham publik. Struktur ini mencerminkan karakteristik DPLK sebagai entitas yang tidak berbentuk perseroan terbuka, melainkan sebagai badan hukum dana pensiun yang dalam operasionalnya merupakan salah satu bagian dari unit kerja Pendiri. Adapun wilayah operasional DPLK bank **bjb** mencakup berbagai daerah yang didukung oleh kantor jaringan bank **bjb** sehingga layanan program pensiun dapat diakses oleh peserta di berbagai wilayah sesuai dengan cakupan operasional tersebut.

3. Produk, Layanan, dan Kegiatan Usaha

DPLK bank **bjb** menjalankan kegiatan usaha utama berupa penyelenggaraan Program Pensiun Iuran Pasti, yaitu program pensiun di mana besaran manfaat yang diterima oleh peserta pada saat pensiun bergantung pada akumulasi iuran serta hasil pengembangan dana selama masa kepesertaan. Karakteristik utama dari produk pensiun yang diselenggarakan oleh DPLK bank **bjb** terletak pada fleksibilitas dalam penetapan besaran iuran serta pilihan strategi investasi yang dapat disesuaikan dengan profil risiko dan kebutuhan peserta. Melalui mekanisme tersebut, peserta memiliki peran aktif dalam menentukan arah pengelolaan dana pensiun yang dimilikinya. Dalam pengelolaan produk ini, DPLK bank **bjb** menyediakan beberapa pilihan penempatan investasi yang dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga memungkinkan peserta untuk menyesuaikan komposisi investasi dengan tujuan keuangan jangka panjang. Pengelolaan dana dilakukan secara kolektif dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian serta keseimbangan antara risiko dan potensi hasil.

Selain itu, produk pensiun yang diselenggarakan juga didukung oleh sistem administrasi kepesertaan yang memungkinkan pencatatan iuran, pengembangan dana, serta penyampaian informasi kepada peserta dilakukan secara terstruktur dan

berkelanjutan. Sebagai lembaga jasa keuangan, kegiatan usaha DPLK bank **bjb** tidak memiliki dampak langsung terhadap lingkungan hidup dalam skala signifikan. Namun demikian, peran DPLK bank **bjb** dalam pengelolaan dana jangka panjang memberikan kontribusi tidak langsung terhadap aspek keberlanjutan, khususnya melalui pengelolaan investasi dan penyediaan layanan keuangan

4. Keanggotaan dan Afiliasi

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, DPLK bank **bjb** berpartisipasi dalam keanggotaan asosiasi dan/atau forum yang berkaitan dengan industri dana pensiun dan jasa keuangan, yaitu Asosiasi DPLK (ADPLK). Keikutsertaan tersebut bertujuan untuk mendukung pengembangan kapasitas organisasi serta mengikuti perkembangan praktik di industri. Melalui keanggotaan dan afiliasi, DPLK bank **bjb** memiliki akses terhadap berbagai informasi, kajian, serta forum diskusi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dana pensiun dan pelayanan kepada peserta. Selain itu, partisipasi dalam forum industri juga menjadi sarana untuk berbagi pengalaman dan *best practices* dengan pelaku industri lainnya.

5. Visi dan Misi Dana Pensiun Lembaga Keuangan

a. Visi

Menjadi Dana Pensiun Lembaga Keuangan pilihan utama yang terpercaya dan memberikan manfaat optimal bagi peserta

b. Misi Dana Pensiun Lembaga Keuangan

- 1) Memberikan perlindungan terhadap nilai manfaat pensiun melalui optimilisasi pengembangan dana
- 2) Meningkatkan literasi dan inklusi kepada *stakeholder* tentang pentingnya program pensiun
- 3) Meningkatkan Digitalisasi Akses Layanan

- 4) Menerapkan Tata Kelola Dana Pensiun Keuangan yang baik dengan prinsip *Good Pension Funds Governance*

6. **Core Values**

Sebagai bagian dari ekosistem bank **bjb**, DPLK bank **bjb** mengadopsi nilai-nilai perusahaan yang menjadi pedoman dalam menjalankan kegiatan usaha serta dalam memberikan layanan kepada peserta. Nilai-nilai tersebut tidak hanya menjadi dasar dalam membentuk budaya kerja, tetapi juga menjadi acuan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tanggung jawab organisasi. Nilai-nilai perusahaan yang diterapkan mengacu pada core values bank **bjb**, yaitu **GO SPIRIT**, yang mencerminkan semangat kerja dan perilaku profesional dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi. GO SPIRIT merupakan akronim yang mencerminkan nilai-nilai utama yang dijunjung dalam pelaksanaan kegiatan usaha, yang meliputi:

Service Excellence

1. Fokus pada Nasabah
2. Proaktif dan cepat tanggap dalam memberikan layanan bernilai tambah

Professionalism

3. bekerja efektif, efisien, dan bertanggung jawab
4. Meningkatkan kompetensi untuk menghasilkan kinerja terbaik

Integrity

5. Jujur, disiplin, dan konsisten
6. Memahami dan melaksanakan ketentuan yang berlaku

Respect

7. menghormati dan menghargai serta terbuka terhadap perbedaan
8. Memberi dan menerima pendapat yang positif dan konstruktif

Innovation

9. Kreatif dan inovatif untuk memberika solusi terbaik
10. Melakukan perbaikan berkelanjutan

Trust

11. Berperilaku positif dan dapat dipercaya
12. Membangun sinergi untuk mencapai tujuan perusahaan

Nilai-nilai perusahaan tersebut juga menjadi landasan dalam membangun budaya kerja yang mendukung penerapan prinsip Keuangan Berkelanjutan secara bertahap di lingkungan DPLK bank **bjb**.

7. Nilai Berkelanjutan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, DPLK bank **bjb** secara bertahap mulai mengintegrasikan nilai keberlanjutan sebagai bagian dari pengembangan organisasi. Sebagai lembaga pengelola dana pensiun yang berorientasi jangka panjang, DPLK bank **bjb** memandang bahwa keberlanjutan tidak hanya berkaitan dengan dampak langsung terhadap lingkungan, tetapi juga dengan kemampuan dalam menjaga stabilitas pengelolaan dana serta kesinambungan manfaat bagi peserta. Oleh karena itu, nilai keberlanjutan lebih difokuskan pada penerapan prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik, serta pengelolaan risiko jangka panjang.

Dalam praktiknya, nilai keberlanjutan di DPLK bank **bjb** tercermin melalui beberapa prinsip utama, yaitu:

1. Tata Kelola yang Baik (*Good Governance*)
Menjalankan kegiatan usaha dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, sebagai bagian dari upaya menjaga kepercayaan peserta dan pemangku kepentingan.
2. Pengelolaan Dana secara Bertanggung Jawab (*Fiduciary Responsibility*)
Mengelola dana peserta dengan prinsip kehati-hatian dan orientasi jangka panjang, dengan mempertimbangkan risiko serta potensi keberlanjutan nilai investasi.
3. Fokus pada Kepentingan Peserta
Menempatkan kepentingan peserta sebagai prioritas utama dalam setiap pengambilan keputusan, sejalan dengan tanggung jawab fiduciary dalam pengelolaan dana pensiun.
4. Penguatan Kapasitas dan Pembelajaran Berkelanjutan
Mendorong peningkatan pemahaman dan kompetensi internal sebagai bagian dari kesiapan dalam mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam kegiatan usaha.

Dengan pendekatan tersebut, nilai keberlanjutan di DPLK bank **bjb** diharapkan dapat terus berkembang dan menjadi bagian yang terintegrasi dalam pengelolaan dana pensiun, seiring dengan peningkatan kapasitas organisasi dan perkembangan penerapan Keuangan Berkelanjutan di masa mendatang.

PENJELASAN PENGURUS

1. Kebijakan Merespon Tantangan dalam Pemenuhan Strategi Keberlanjutan

A. Nilai keberlanjutan bagi DPLK bank **bjb**

Keberlanjutan bagi DPLK bank **bjb** terletak pada integrasi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (LST) dalam strategi bisnis. Penerapan nilai-nilai ini bertujuan menghasilkan pertumbuhan yang stabil dan berdampak positif jangka panjang. Adapun poin-poin penting nilai keberlanjutan diantaranya:

- a. *Penyelarasan Tiga Aspek Utama Environmental, Social, and Governance (ESG)*
Menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan tanggung jawab sosial dan kelestarian lingkungan hidup dalam setiap produk dan transaksi keuangan.
- b. *Peningkatan Inklusi dan Akses Keuangan*
Memperluas akses layanan keuangan ke sektor-sektor yang belum terjangkau perbankan konvensional serta membantu pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.
- c. *Manajemen Risiko yang Lebih Baik*
Mengelola risiko lingkungan dan sosial secara proaktif untuk meningkatkan stabilitas sistem keuangan jangka panjang.
- d. *Pelaporan Kinerja*
Penerapan keuangan berkelanjutan akan dilaporkan kinerja LST melalui laporan keberlanjutan (*sustainability report*).
- e. *Pembiayaan dan Investasi Hijau*
Menempatkan dana ke investasi berkelanjutan yang mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon.
- f. *Kepatuhan dan Stabilitas*
Mematuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan untuk menjamin lembaga keuangan yang sehat dan stabil.

Secara keseluruhan, nilai berkelanjutan bertujuan agar DPLK bank **bjb** tidak hanya mengejar keuntungan finansial, tetapi juga memberikan kontribusi positif pada masyarakat dan lingkungan, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan publik dan ketahanan lembaga.

B. Respon terhadap isu terkait penerapan Keuangan Berkelanjutan

a. Kepatuhan Terhadap Regulasi POJK Nomor 51/POJK.03/2017

Menerapkan keuangan berkelanjutan dan menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) serta menerbitkan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) tahunan.

b. Penyusunan Pedoman Teknis

Menyusun kebijakan internal yang mempertimbangkan risiko lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG).

c. Peluncuran Produk Hijau

Menggunakan salah satu produk, seperti *Green bond*, *Green Sukuk*, reksadana berbasis ESG.

d. Peningkatan Kesadaran dan Kapasitas

Terdapat upaya peningkatan pemahaman mengenai risiko sektor bisnis terkait isu sosial dan lingkungan, meskipun diakui masih ada kelemahan dalam pemahaman bisnis sektoral.

e. Penguatan Komitmen Manajemen

Pengurus berkomitmen dalam pencapaian kinerja keberlanjutan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

C. Komitmen terhadap Keuangan Berkelanjutan

Komitmen terhadap keuangan berkelanjutan diwujudkan melalui kepatuhan terhadap POJK Nomor 51/POJK.03/2017, yang mewajibkan penerapan prinsip *Environmental, Social, and Governance (ESG)*. Komitmen ini bertujuan mendorong pembiayaan hijau, mencapai target Net Zero Emission (NZE) 2060, serta mengintegrasikan manajemen risiko iklim ke dalam strategi bisnis.

Adapun poin-poin utama komitmen adalah sebagai berikut.

a. Penerapan Regulasi POJK Nomor 51/POJK.03/2017

Menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan menerbitkan Laporan Keberlanjutan.

- b. Pembiayaan Hijau (*Green Financing*)
Peningkatan portofolio *Green bond*
- c. Manajemen Risiko ESG
Menggunakan *negative screening* atau *exclusion list* untuk menghindari penempatan investasi pada sektor berisiko tinggi terhadap kerusakan lingkungan atau sosial.
- d. Produk Keuangan Berkelanjutan
Mengembangkan produk seperti *Green bond* -dan reksa dana berbasis ESG.
- e. Penguatan Tata Kelola (ESG)
Mengintegrasikan prinsip sosial (kesetaraan tenaga kerja) dan tata kelola yang baik (transparansi, manajemen risiko) dalam operasional bisnis.

D. Pencapaian kinerja penerapan keuangan berkelanjutan

Pencapaian kinerja penerapan keuangan berkelanjutan berfokus pada integrasi prinsip ESG (*Environmental, Social, Governance*) ke dalam portofolio investasi dan operasional. Indikator utama mencakup penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB), efisiensi energi/ kertas, serta peningkatan investasi pada instrumen ramah lingkungan atau proyek sosial. Adapun Poin-poin Pencapaian Kinerja Keuangan Berkelanjutan adalah sebagai berikut.

- a. Penyusunan RAKB dan Pelaporan
Menyusun dan melaporkan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) serta Laporan Keberlanjutan sesuai POJK Nomor 51/POJK.03/2017.
- b. Investasi Bertanggung Jawab (ESG)
Mengalihkan portofolio investasi ke sektor-sektor yang memenuhi kriteria lingkungan dan sosial.
- c. Efisiensi Operasional
Penurunan biaya operasional secara signifikan, seperti pengurangan penggunaan kertas (digitalisasi) dan listrik.
- d. Edukasi dan Literasi
Peningkatan literasi keuangan berkelanjutan baik internal maupun kepada peserta DPLK.

e. Tantangan

Masih terdapat tantangan berupa kebutuhan pemahaman yang lebih dalam terkait isu lingkungan/sosial.

E. Indikator Kinerja Utama Keberlanjutan

a. Kinerja portofolio investasi pada instrumen atau proyek yang sejalan dengan keuangan berkelanjutan.

b. Pengembangan produk DPLK yang mendukung keberlanjutan.

c. Penerapan manajemen risiko terkait faktor sosial dan lingkungan hidup.

Penerapan ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan dan daya saing jangka panjang DPLK.

F. Tantangan pencapaian kinerja penerapan Keuangan Berkelanjutan

DPLK menghadapi beberapa tantangan dalam mencapai kinerja keuangan berkelanjutan. Tantangan tersebut meliputi aspek operasional, investasi, dan pemahaman internal. Berikut adalah tantangan utama pencapaian kinerja penerapan keuangan berkelanjutan:

a. Rendahnya Pemahaman dan SDM

Kurangnya pemahaman karyawan mengenai prinsip keuangan berkelanjutan (ESG - *Environmental, Social, and Governance*) serta terbatasnya SDM yang mumpuni dalam manajemen risiko berbasis lingkungan.

b. Dinamika Investasi dan Suku Bunga

Pasar keuangan global yang volatil berpotensi menurunkan imbal hasil (*yield*) investasi. Perubahan arah suku bunga menyulitkan DPLK untuk menyeimbangkan portofolio investasi yang hijau dengan target imbal hasil yang diharapkan.

c. Keterbatasan Instrumen Investasi Hijau

Masih terbatasnya pilihan instrumen investasi berbasis lingkungan yang likuid dan memberikan imbal hasil kompetitif bagi DPLK.

d. Manajemen Risiko ESG

Kesulitan dalam mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko sosial dan lingkungan hidup dalam portofolio investasi atau portofolio pembiayaan.

e. Biaya Penerapan Tinggi

Adanya beban biaya untuk menerapkan sistem pengelolaan keuangan berkelanjutan, perombakan infrastruktur investasi, peningkatan kompetensi staf, dan pelaporan yang rumit, contohnya meliputi investasi ulang pada sistem IT untuk *screening* ESG, biaya konsultasi ahli, serta pelatihan SDM.

f. Kurangnya Kesadaran

Rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat terkait program pensiun dan investasi berkelanjutan secara umum, yang memengaruhi pertumbuhan dana kelolaan.

g. Orientasi pada Pertumbuhan Ekonomi

Masih kuatnya orientasi pada keuntungan jangka pendek dibandingkan kinerja *Environmental, Social, and Governance* (ESG).

2. Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Penerapan keuangan berkelanjutan pada DPLK bank **bjb** meliputi:

1. Pencapaian kinerja penerapan Keuangan Berkelanjutan (ekonomi, sosial, dan Lingkungan Hidup) dibandingkan dengan target;
2. Prestasi dan tantangan (termasuk peristiwa penting) selama periode pelaporan yang akan dituangkan dalam Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.

TATA KELOLA KEBERLANJUTAN

Penerapan Keuangan Berkelanjutan tidak dapat dipisahkan dari bagaimana suatu organisasi dikelola, khususnya dalam memastikan bahwa setiap kebijakan, proses, dan pengambilan keputusan dilakukan secara bertanggung jawab dan mempertimbangkan kepentingan jangka panjang. Dalam konteks Dana Pensiun, tata kelola memiliki peran yang semakin strategis mengingat karakteristik pengelolaan dana yang bersifat jangka panjang serta keterkaitannya langsung dengan kepentingan peserta. Dalam praktiknya, tata kelola keberlanjutan tidak dibangun sebagai sistem yang terpisah, melainkan dikembangkan melalui pemanfaatan struktur tata kelola yang telah berjalan, termasuk peran Pengurus, Dewan Pengawas, serta unit kerja terkait. Pendekatan ini memungkinkan integrasi prinsip keberlanjutan dilakukan secara bertahap tanpa mengganggu mekanisme operasional yang telah ada.

Sebagai lembaga yang mengelola dana peserta, DPLK bank **bjb** menghadapi kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara pencapaian kinerja keuangan dan pengelolaan risiko yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan perkembangan praktik global, di mana lembaga dana pensiun tidak hanya dituntut untuk menghasilkan imbal hasil, tetapi juga memastikan bahwa keputusan investasi dan operasional mempertimbangkan aspek ESG. Sejalan dengan praktik global, tata kelola keberlanjutan pada lembaga dana pensiun memiliki keterkaitan erat dengan *fiduciary duty*, yaitu kewajiban untuk mengelola dana secara hati-hati, transparan, dan berorientasi jangka panjang. Hal ini juga sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, khususnya SDG 16 (*Peace, Justice and Strong Institutions*) yang menekankan pentingnya tata kelola yang baik dan akuntabel, serta SDG 8 (*Decent Work and Economic Growth*) yang berkaitan dengan pengelolaan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian, penerapan tata kelola keberlanjutan tidak hanya menjadi aspek kepatuhan, tetapi juga merupakan kebutuhan dalam menjaga kepercayaan dan legitimasi organisasi.

- a. Di sisi lain, praktik yang diterapkan oleh industri Dana Pensiun juga menunjukkan bahwa tata kelola keberlanjutan berkembang melalui penguatan struktur organisasi, peningkatan kapasitas internal, serta integrasi aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola ke dalam kegiatan operasional dan investasi. Hal ini menunjukkan bahwa

penerapan keberlanjutan tidak selalu dimulai dari kebijakan yang kompleks, melainkan dapat berkembang secara bertahap melalui penguatan fondasi tata kelola yang telah ada.

1. Struktur Tanggung Jawab Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Penerapan Keuangan Berkelanjutan di DPLK bank **bjb** dilaksanakan dengan mengacu pada struktur tata kelola organisasi yang telah berjalan, yang pada prakteknya mengacu kepada POJK No 35 Tahun 2024 tentang Perizinan dan Kelembagaan Dana Pensiun dengan melibatkan struktur yang ada, meliputi peran Pengurus, Dewan Pengawas, serta fungsi pendukung seperti manajemen risiko, kepatuhan, audit internal, pengelolaan investasi, dan lainnya. Pendekatan ini mencerminkan bahwa tanggung jawab atas aspek keberlanjutan tidak berdiri secara terpisah, melainkan terintegrasi dalam fungsi pengelolaan dan pengawasan yang telah ada.

Pengurus sebagai organ yang bertanggung jawab atas pengelolaan kegiatan usaha memiliki peran utama dalam menetapkan arah dan kebijakan, termasuk dalam mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam kegiatan operasional dan investasi. Dalam konteks ini, Pengurus memastikan bahwa pengelolaan dana dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap ketentuan regulator, serta mempertimbangkan risiko jangka panjang yang dapat mempengaruhi keberlanjutan manfaat bagi peserta. Di sisi lain, Dewan Pengawas menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kegiatan usaha, termasuk dalam memastikan bahwa penerapan Keuangan Berkelanjutan berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Fungsi pengawasan ini dilakukan melalui mekanisme evaluasi berkala serta dukungan komite di bawah Dewan Pengawas, seperti komite audit dan komite pemantau risiko, yang berperan dalam memperkuat sistem pengendalian internal. Selain itu, grup kerja terkait menjalankan fungsi-fungsi dalam mendukung pelaksanaan kegiatan usaha, termasuk dalam pengelolaan investasi, pelayanan kepada peserta, serta fungsi kepatuhan dan manajemen risiko. Masing-masing fungsi tersebut berperan dalam memastikan bahwa aspek keberlanjutan mulai dipertimbangkan dalam proses identifikasi risiko, pengambilan keputusan, serta pengendalian kegiatan usaha.

Dalam praktik global, pembagian peran seperti ini sejalan dengan prinsip tata kelola keberlanjutan yang menekankan adanya keterlibatan berbagai level organisasi dalam mengelola risiko dan peluang keberlanjutan, termasuk melalui fungsi pengawasan dan pengendalian internal. Pendekatan ini juga membantu mengurangi kesenjangan informasi antara pengelola dan pemangku kepentingan, yang merupakan salah satu tantangan utama dalam pengelolaan Dana Pensiun.

Dengan demikian, struktur tanggung jawab penerapan Keuangan Berkelanjutan di DPLK bank **bjb** mencerminkan pendekatan yang terintegrasi, di mana seluruh organ organisasi berperan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya dalam mendukung pengelolaan yang berkelanjutan.

2. Pengembangan Kompetensi Keberlanjutan

Pengembangan kompetensi merupakan salah satu elemen penting dalam mendukung penerapan Keuangan Berkelanjutan, khususnya dalam memastikan bahwa organ organisasi dan grup kerja terkait memiliki pemahaman yang memadai terhadap konsep, risiko, serta peluang yang berkaitan dengan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola.

Di DPLK bank **bjb**, pengembangan kompetensi pada dasarnya telah berjalan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang dana pensiun, investasi, manajemen risiko, APU PPT, kepatuhan, dan bidang lainnya yang menjadi fungsi utama dalam pengelolaan dana pensiun. Kompetensi tersebut diperoleh melalui kepemilikan sertifikasi profesi, pelatihan teknis, serta pembelajaran berkelanjutan yang relevan dengan kebutuhan organisasi. Kebutuhan akan kompetensi yang memadai juga berkaitan dengan *fiduciary duty* dalam mengelola dana peserta. Pemahaman terhadap aspek keberlanjutan menjadi semakin relevan karena keputusan investasi tidak hanya berdampak pada kinerja jangka pendek, tetapi juga pada stabilitas dan keberlanjutan manfaat dalam jangka panjang.

Seiring dengan mulai diintegrasikannya prinsip Keuangan Berkelanjutan, pengembangan kompetensi juga diarahkan untuk mendukung pemahaman awal terhadap aspek keberlanjutan, khususnya dalam kaitannya dengan pengelolaan investasi dan identifikasi risiko jangka panjang. Pendekatan ini dilakukan secara bertahap, dengan memanfaatkan kerangka pengembangan yang telah ada tanpa memerlukan perubahan struktural yang signifikan pada tahap awal.

Dengan demikian, pengembangan kompetensi di DPLK bank **bjb** tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan operasional, tetapi juga mulai menjadi bagian dari proses penguatan kapasitas organisasi dalam mendukung penerapan Keuangan Berkelanjutan secara bertahap di masa mendatang.

3. Manajemen Risiko Keberlanjutan

Dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan, pengelolaan risiko menjadi aspek yang sangat penting, mengingat adanya potensi dampak dari faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan terhadap kinerja organisasi serta keberlanjutan manfaat bagi peserta. Bagi DPLK bank **bjb** sebagai lembaga pengelola dana pensiun, pendekatan terhadap risiko tidak hanya berfokus pada aspek finansial, tetapi juga mulai mempertimbangkan risiko jangka panjang yang dapat mempengaruhi stabilitas pengelolaan dana. Dalam konteks keberlanjutan, pengelolaan risiko masih terintegrasi dalam kerangka umum tersebut dan belum dipisahkan secara khusus sebagai risiko keberlanjutan. Namun demikian, pendekatan ini telah mencakup pengelolaan risiko jangka panjang yang relevan dengan karakteristik pengelolaan dana pensiun.

Pada periode pelaporan, DPLK bank **bjb** telah memiliki kerangka manajemen risiko yang berjalan dan digunakan sebagai dasar dalam mengelola berbagai risiko yang timbul dari kegiatan usaha. Kerangka tersebut mencakup proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, yang dilaksanakan oleh fungsi manajemen risiko dan didukung oleh fungsi yang ada. Dalam pelaksanaannya, Pengurus berperan dalam memastikan bahwa proses manajemen risiko berjalan secara memadai, termasuk dalam mengintegrasikan pertimbangan risiko keberlanjutan dalam pengambilan keputusan.

Pengurus juga melakukan *review* secara berkala terhadap efektivitas pengelolaan risiko sebagai bagian dari tanggung jawab pengelolaan organisasi. Di sisi lain, Dewan Pengawas menjalankan fungsi pengawasan terhadap implementasi manajemen risiko, termasuk dalam menilai kecukupan dan efektivitas sistem yang diterapkan. Fungsi ini diperkuat melalui peran komite pemantau risiko yang membantu dalam melakukan evaluasi terhadap profil risiko dan pengendaliannya.

Dalam praktik global, integrasi risiko keberlanjutan ke dalam kerangka manajemen risiko organisasi menjadi salah satu elemen utama dalam tata kelola keberlanjutan. Berbagai literatur menekankan bahwa investor institusional seperti dana pensiun, pengelolaan risiko ESG merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas jangka panjang serta melindungi kepentingan peserta. Selain itu, regulasi nasional juga mengarah pada penguatan tata kelola berbasis risiko. Pendekatan ini tercermin dalam ketentuan terbaru yang menekankan pentingnya integrasi manajemen risiko dalam seluruh proses pengelolaan lembaga jasa keuangan, termasuk dalam mempertimbangkan risiko yang bersifat jangka panjang dan non-finansial.

4. Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Engagement*)

1. Identifikasi dan Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan, DPLK bank **bjb** mengidentifikasi pemangku kepentingan sebagai pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap kegiatan usaha serta pihak yang dapat terdampak oleh pengelolaan dana pensiun. Identifikasi ini dilakukan berdasarkan pertimbangan manajemen terhadap tingkat kepentingan dan pengaruh masing-masing pihak terhadap organisasi. Pemangku kepentingan utama DPLK bank **bjb** meliputi Pendiri, Pengurus, Peserta, dan regulator. Kelompok-kelompok tersebut memiliki peran yang berbeda, baik sebagai penerima manfaat, pelaksana operasional, maupun pihak yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha.

Dalam konteks dana pensiun, peserta merupakan pemangku kepentingan utama karena memiliki kepentingan langsung terhadap pengelolaan dana dan keberlanjutan

manfaat yang akan diterima. Oleh karena itu, pengelolaan hubungan dengan peserta menjadi salah satu fokus dalam penerapan tata kelola yang baik. Adanya hubungan antara pengelola dan peserta berpotensi menimbulkan asimetri informasi, sehingga diperlukan transparansi dan komunikasi yang memadai untuk menjaga kepercayaan serta memastikan bahwa kepentingan peserta tetap terlindungi.

Dalam periode ini, identifikasi pemangku kepentingan dalam konteks Keuangan Berkelanjutan masih mengacu pada pemangku kepentingan utama yang telah ada, dan belum dilakukan pemetaan khusus terkait isu keberlanjutan.

2. Pendekatan Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Keterlibatan pemangku kepentingan di DPLK bank **bjb** dilakukan melalui berbagai mekanisme yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pihak. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan adanya komunikasi yang efektif, penyampaian informasi yang memadai, serta pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan dalam kaitannya dengan kegiatan usaha. Bentuk keterlibatan tersebut antara lain meliputi:

- a. Penyediaan layanan dan komunikasi kepada peserta, termasuk dalam penyampaian informasi terkait kepesertaan dan manfaat;
- b. Pelaporan dan koordinasi dengan regulator sebagai bentuk kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku;
- c. Koordinasi internal antar grup maupun dengan unit kerja Pendiri dalam mendukung pelaksanaan kegiatan usaha;
- d. Partisipasi dalam forum atau kegiatan industri sebagai bagian dari pertukaran informasi dan pengembangan organisasi.

Dalam konteks Keuangan Berkelanjutan, keterlibatan pemangku kepentingan mulai diarahkan untuk mendukung peningkatan pemahaman terhadap konsep keberlanjutan, baik di lingkungan internal maupun eksternal

5. Permasalahan, Perkembangan, dan Pengaruh

Dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan, DPLK bank **bjb** menghadapi sejumlah tantangan yang merupakan karakteristik umum pada tahap awal implementasi, khususnya bagi lembaga jasa keuangan yang baru mulai mengintegrasikan aspek keberlanjutan ke dalam kegiatan usahanya. Permasalahan yang dihadapi pada periode pelaporan ini antara lain meliputi keterbatasan pemahaman internal terkait konsep dan implementasi Keuangan Berkelanjutan, serta keterbatasan data dan referensi yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, khususnya yang berkaitan dengan instrumen investasi berkelanjutan. Selain itu, belum tersedianya kebijakan internal yang secara khusus mengatur penerapan Keuangan Berkelanjutan juga menjadi salah satu tantangan dalam proses implementasi. Permasalahan tersebut merupakan bagian dari tahap awal pelaksanaan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan, di mana kegiatan masih difokuskan pada penguatan pemahaman, penyiapan kerangka dasar, serta riset terhadap perkembangan pasar. Meskipun demikian, terdapat perkembangan yang mulai terlihat sebagai bagian dari proses pembentukan fondasi penerapan Keuangan Berkelanjutan.

Perkembangan ini menunjukkan bahwa DPLK bank **bjb** telah mulai memasuki fase awal integrasi keberlanjutan, meskipun implementasi yang bersifat komprehensif belum dilakukan. Tahap awal ini dikenal sebagai fase *capacity building* di mana organisasi berfokus pada penguatan kapasitas internal sebelum melakukan implementasi yang lebih luas. Fase ini merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa penerapan keberlanjutan dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan. Dari sisi pengaruh, kondisi tersebut menyebabkan penerapan Keuangan Berkelanjutan pada periode pelaporan masih bersifat terbatas dan belum memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja ekonomi, sosial, maupun lingkungan secara langsung. Namun demikian, langkah awal yang dilakukan telah memberikan dasar yang penting dalam membangun kesiapan organisasi untuk mengintegrasikan prinsip keberlanjutan secara lebih luas di masa mendatang.

KINERJA KEBERLANJUTAN

Kinerja keberlanjutan merupakan gambaran mengenai sejauh mana DPLK bank **bjb** mengintegrasikan prinsip Keuangan Berkelanjutan ke dalam kegiatan usaha, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun lingkungan hidup. Pengungkapan kinerja ini tidak hanya mencerminkan capaian yang telah diperoleh, tetapi juga menunjukkan arah pengembangan yang dilakukan secara bertahap dalam mendukung pengelolaan dana pensiun yang berkelanjutan.

Sebagai lembaga pengelola dana jangka panjang, DPLK bank **bjb** memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan entitas yang berbasis produksi atau memiliki dampak langsung terhadap lingkungan. Oleh karena itu, kinerja keberlanjutan DPLK bank **bjb** lebih banyak tercermin pada kualitas tata kelola, stabilitas pengelolaan dana, kualitas layanan kepada peserta, kemampuan organisasi dalam mengelola risiko jangka panjang, serta kontribusi terhadap kesejahteraan peserta melalui penyelenggaraan program pensiun.

Kinerja laporan keberlanjutan pada periode pelaporan 2025 masih berada pada tahap awal pengembangan, dengan fokus utama pada penguatan landasan strategis dan riset instrumen keuangan berkelanjutan, khususnya *Green bond*. Sebagai bagian dari implementasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB), DPLK bank **bjb** melakukan kajian dan pemantauan pasar (*market research*) terhadap instrumen investasi berbasis lingkungan. Salah satu referensi utama dalam riset tersebut adalah praktik penerbitan Obligasi Berwawasan Lingkungan (*Green bond*). Riset ini menjadi relevan mengingat *green bond* merupakan salah satu instrumen utama dalam keuangan berkelanjutan yang mampu mengintegrasikan tujuan ekonomi dengan dampak lingkungan dan sosial secara simultan

Pendekatan ini selaras dengan praktik global di sektor Dana Pensiun, yang menekankan pentingnya integrasi aspek ESG dalam mendukung keberlanjutan nilai investasi dan perlindungan kepentingan peserta. Sebagai lembaga pengelola dana pensiun, kinerja keberlanjutan DPLK bank **bjb** memiliki karakteristik yang lebih menitikberatkan pada stabilitas pengelolaan dana, kualitas layanan kepada peserta, serta pengelolaan operasional yang efisien. Oleh karena itu, indikator yang digunakan disesuaikan dengan relevansi kegiatan usaha dan dampak yang dihasilkan.

1. Budaya Keberlanjutan

A. Pembangunan Budaya Keberlanjutan

Pembangunan budaya keberlanjutan merupakan langkah awal dalam mendukung penerapan Keuangan Berkelanjutan di DPLK bank **bjb**, khususnya dalam membentuk pemahaman dan kesadaran internal terhadap pentingnya integrasi ESG dalam kegiatan usaha. Sebagai lembaga pengelola dana pensiun, DPLK bank **bjb** memandang bahwa budaya keberlanjutan tidak hanya berkaitan dengan penerapan kebijakan formal, tetapi juga dengan bagaimana nilai-nilai keberlanjutan mulai dipahami dan diterapkan dalam proses kerja sehari-hari. Oleh karena itu, pada tahap awal ini, pembangunan budaya keberlanjutan difokuskan pada peningkatan awareness dan pemahaman di lingkungan internal organisasi. Upaya tersebut dilakukan melalui pemanfaatan struktur organisasi yang telah ada, termasuk peran Pengurus, Dewan Pengawas, serta unit kerja terkait dalam mendorong penerapan prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik, serta pengelolaan risiko jangka panjang. Pendekatan ini mencerminkan bahwa budaya keberlanjutan dibangun secara bertahap melalui proses yang terintegrasi dengan kegiatan operasional yang telah berjalan.

B. Integrasi Nilai Keberlanjutan dalam Organisasi

Sejalan dengan pembangunan budaya keberlanjutan, DPLK bank **bjb** mulai mengintegrasikan nilai-nilai keberlanjutan ke dalam kegiatan usaha secara bertahap, khususnya dalam aspek tata kelola, pengelolaan risiko, dan pengambilan keputusan investasi. Integrasi ini belum dilakukan melalui kebijakan khusus yang terpisah, melainkan melalui penerapan prinsip-prinsip yang telah menjadi bagian dari tata kelola perusahaan, seperti transparansi, akuntabilitas, serta prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan dana peserta. Pendekatan ini memungkinkan nilai keberlanjutan mulai tertanam dalam proses kerja tanpa memerlukan perubahan struktural yang signifikan pada tahap awal. Dalam praktiknya, integrasi nilai keberlanjutan juga terlihat dalam upaya mempertimbangkan risiko jangka panjang serta perkembangan instrumen investasi yang berkaitan dengan aspek keberlanjutan. Hal ini menjadi

langkah awal dalam mengarahkan pengelolaan dana agar tidak hanya berorientasi pada kinerja finansial, tetapi juga mempertimbangkan aspek keberlanjutan secara lebih luas.

2. Kinerja Ekonomi

Kinerja ekonomi DPLK bank **bjb** dalam tiga tahun terakhir mencerminkan kemampuan organisasi dalam mengelola dana pensiun serta memberikan layanan kepada peserta secara berkelanjutan. Sebagai lembaga pengelola dana jangka panjang, kinerja ekonomi tidak hanya dilihat dari pencapaian finansial, tetapi juga dari stabilitas pengelolaan dana serta kesinambungan manfaat yang diberikan kepada peserta. Dalam periode pelaporan, kegiatan usaha DPLK bank **bjb** difokuskan pada penyelenggaraan program pensiun iuran pasti serta pengelolaan dana peserta hingga melakukan riset penerbitan *green bond*.

Berdasarkan hasil riset, penerbitan *green bond* tidak hanya berfungsi sebagai alternatif sumber pendanaan, tetapi juga sebagai strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan melalui pembiayaan proyek-proyek ramah lingkungan. Berdasarkan hasil riset DPLK bank **bjb**, penerbitan *green bond* dapat menjadi alternatif sumber pendanaan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, antara lain melalui pembiayaan proyek-proyek ramah lingkungan. Pemilihan *green bond* sebagai instrumen investasi dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan pertimbangan kinerja keuangan, yaitu sepanjang instrumen tersebut memenuhi kelayakan ekonomi, bermanfaat bagi masyarakat sekitar, memberikan imbal hasil yang kompetitif dan stabil, serta memiliki tingkat risiko yang sesuai dengan kebijakan investasi dan karakteristik pengelolaan dana pensiun jangka panjang.

Pemilihan *green bond* tersebut harus memenuhi kriteria yang ada pada pedoman investasi DPLK, beberapa diantaranya adalah sisi kinerja keuangan yang tingkat stabilitas dan kapasitas yang kuat (dalam hal ini tercermin dari besaran aset yang signifikan), rasio permodalan (Capital Adequacy Ratio/CAR) yang berada di atas ketentuan minimum, serta kualitas aset yang terjaga melalui rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) yang rendah. Selain itu, tingkat profitabilitas yang positif, sebagaimana tercermin pada

Return on Assets (ROA) dan Return on Equity (ROE), serta efisiensi operasional melalui rasio BOPO yang terkendali, menunjukkan kemampuan dalam menghasilkan kinerja keuangan yang berkelanjutan.

Dalam praktik dana pensiun, pengelolaan portofolio jangka panjang yang *prudent* menjadi faktor utama dalam menjaga keberlanjutan manfaat peserta. Kinerja investasi merupakan komponen utama dalam kinerja ekonomi DPLK bank **bjb**, mengingat dana yang dikelola diinvestasikan untuk menghasilkan imbal hasil jangka panjang bagi peserta. Pengelolaan portofolio dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan diversifikasi aset, dengan komposisi investasi yang disesuaikan dengan profil risiko serta ketentuan regulator.

Komposisi portofolio investasi dalam tiga tahun terakhir dapat digambarkan sebagai berikut:

| Jenis Investasi | 2023 (%) | 2024 (%) | 2025 (%) |
|---|----------|----------|----------|
| Deposito on Call | 0.08 | 0.26 | 1.02 |
| Deposito berjangka | 86.53 | 71.70 | 68.24 |
| Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia | - | 13.09 | 2.49 |
| SBN | 7.92 | 10.28 | 8.68 |
| Obligasi | 3.60 | 3.48 | 3.12 |
| Sukuk Korporasi | 0.14 | 0.54 | 0.72 |
| Reksa Dana | 1.17 | 0.38 | 15.50 |
| MTN | 0.36 | 0.27 | 0.23 |

Sementara itu, tingkat imbal hasil investasi adalah sebagai berikut:

| Indikator | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------|------|------|------|
| Return Investasi (%) | 5.75 | 6.58 | 7.39 |

Dalam pengelolaan kegiatan usaha, DPLK bank **bjb** menetapkan target kinerja sebagai bagian dari perencanaan bisnis tahunan yang kemudian dibandingkan dengan realisasi kinerja pada periode berjalan. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja dalam tiga tahun terakhir disajikan sebagai berikut:

| Indikator | Target 2023 | Realisasi 2023 | Target 2024 | Realisasi 2024 | Target 2025 | Realisasi 2025 |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Dana Kelolaan | 1.256.747.409.783 | 1.410.367.564.820 | 1,607,164,762,013 | 1,863,369,652,421 | 2,211,886,736,915 | 2,143,590,891,710 |

| | | | | | | |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pendapatan | 13.660.057.810 | 16,954,305,861 | 20,000,000,000 | 21,050,141,808 | 23,000,000,000 | 23,760,105,334 |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

Kinerja investasi merupakan komponen utama dalam kinerja ekonomi DPLK bank **bjb**, mengingat dana yang dikelola diinvestasikan untuk menghasilkan imbal hasil jangka panjang bagi peserta. Pengelolaan portofolio dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan diversifikasi aset, dengan komposisi investasi yang disesuaikan dengan profil risiko serta ketentuan regulator.

Sehubungan dengan perbandingan antara target dan realisasi kinerja, dapat disampaikan bahwa pada periode pelaporan ini DPLK bank **bjb** belum menetapkan target khusus terkait penempatan investasi pada instrumen keuangan berkelanjutan, termasuk *green bond*. Hal ini disebabkan karena implementasi Keuangan Berkelanjutan masih berada pada tahap awal, khususnya dalam bentuk kajian dan pemantauan pasar. Dari sisi pengelolaan portofolio investasi, kinerja yang diperoleh berasal dari hasil investasi yang bersifat kupon atau pendapatan tetap sesuai dengan karakteristik instrumen yang digunakan. Dengan demikian, pengukuran kinerja lebih difokuskan pada optimalisasi hasil investasi dan pengelolaan risiko yang prudent, dibandingkan dengan pencapaian target penempatan pada instrumen tertentu.

Selain itu, DPLK bank **bjb** tidak menetapkan target pembiayaan sebagaimana lembaga jasa keuangan yang memiliki fungsi penyaluran kredit, mengingat kegiatan usaha DPLK berfokus pada pengelolaan dana pensiun melalui penempatan investasi. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, penyajian kinerja ekonomi dalam laporan ini lebih menitikberatkan pada gambaran umum pengelolaan portofolio dan hasil investasi yang diperoleh, sebagai bagian dari tahap awal integrasi prinsip Keuangan Berkelanjutan dalam kegiatan usaha.

3. Kinerja Sosial

Kinerja sosial DPLK bank **bjb** mencerminkan peran organisasi dalam memberikan manfaat kepada peserta, menciptakan lingkungan kerja yang layak, serta berkontribusi terhadap masyarakat melalui kegiatan usaha yang dijalankan. Sebagai lembaga pengelola dana pensiun, aspek sosial memiliki keterkaitan langsung dengan kesejahteraan peserta serta kualitas layanan yang diberikan. Dalam pelaksanaannya, DPLK bank **bjb** berkomitmen untuk memberikan layanan yang setara kepada seluruh peserta tanpa adanya diskriminasi.

Selain itu, pengelolaan sumber daya manusia dan hubungan dengan masyarakat juga menjadi bagian penting dalam mendukung keberlanjutan organisasi. Aspek sosial mencakup dampak organisasi terhadap pekerja, konsumen, dan masyarakat, yang perlu dikelola secara bertanggung jawab dan transparan.

1. Layanan kepada Peserta

DPLK bank **bjb** berkomitmen untuk memberikan layanan atas produk dan jasa secara setara kepada seluruh peserta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Layanan yang diberikan mencakup:

- a. Administrasi kepesertaan;
- b. Penyampaian informasi terkait manfaat;
- c. Pengelolaan pembayaran manfaat;
- d. Pelaksanaan literasi keuangan

Dalam pelaksanaannya, DPLK bank **bjb** memastikan bahwa setiap peserta memperoleh akses layanan yang sama tanpa adanya diskriminasi. Pada periode pelaporan ini, penerapan aspek keberlanjutan dalam layanan masih difokuskan pada penyediaan layanan yang andal dan transparan, serta peningkatan pemahaman peserta terhadap program pensiun

2. Ketenagakerjaan

a. Kesetaraan Kesempatan Kerja

DPLK bank **bjb** menerapkan prinsip kesetaraan kesempatan kerja sebagai bagian dari komitmen dalam menciptakan lingkungan kerja yang adil, inklusif, dan profesional. Prinsip ini diterapkan dalam seluruh siklus pengelolaan sumber daya manusia, mulai dari proses rekrutmen, penempatan, pengembangan karier, hingga pemberian remunerasi dan penilaian kinerja. Dalam pelaksanaannya, DPLK bank

bjb memberikan kesempatan yang setara kepada seluruh individu tanpa membedakan latar belakang, seperti jenis kelamin, usia, pendidikan, maupun faktor lainnya, sepanjang memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pegawai memiliki kesempatan yang sama dalam berkontribusi dan berkembang di dalam organisasi. Selain itu, DPLK bank **bjb** juga menegaskan komitmennya terhadap praktik ketenagakerjaan yang bertanggung jawab dengan memastikan bahwa dalam kegiatan operasionalnya tidak terdapat tenaga kerja paksa dan tidak terdapat tenaga kerja anak.

Penerapan prinsip tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga integritas organisasi serta memastikan bahwa kegiatan usaha dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar etika yang berlaku. Dari sisi komposisi tenaga kerja, keberagaman pegawai menjadi salah satu aspek yang mencerminkan penerapan prinsip kesetaraan kesempatan kerja. Informasi mengenai komposisi pegawai dapat disajikan sebagai berikut:

| Indikator | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------|--------|--------|--------|
| Jumlah Pegawai | 23 | 23 | 26 |
| Laki-laki (%) | 56.52% | 56.52% | 61.54% |
| Perempuan (%) | 43.48% | 43.48% | 38.46% |

Dengan demikian, kesetaraan kesempatan kerja di DPLK bank **bjb** tidak hanya menjadi bagian dari kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga merupakan fondasi dalam membangun lingkungan kerja yang mendukung keberlanjutan organisasi secara jangka panjang.

b. Remunerasi dan Kesejahteraan

DPLK bank **bjb** memberikan remunerasi kepada pegawai sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi yang diberikan, dengan tetap memperhatikan prinsip kewajaran, kesetaraan, serta kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku. Kebijakan remunerasi dirancang untuk mendukung motivasi kerja, menjaga keseimbangan

internal, serta memastikan daya saing dengan standar industri jasa keuangan. Selain remunerasi dalam bentuk gaji, DPLK bank **bjb** juga memberikan komponen kesejahteraan lainnya sesuai dengan kebijakan perusahaan, seperti tunjangan dan fasilitas yang mendukung kesejahteraan pegawai. Sebagai bagian dari transparansi dan pengungkapan kinerja sosial, DPLK bank **bjb** menyajikan perbandingan antara remunerasi pegawai tetap di tingkat terendah dengan upah minimum regional (UMR), sebagai berikut:

| Indikator | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Upah Minimum Regional (Rp) | 4.048.462,- | 4.209.309,- | 4.482.914,- |
| Gaji Pegawai Terendah (Rp) | 4.276.000 | 4.476.400 | 4.917.850 |
| Rasio Gaji Terendah terhadap UMR | 105,62% | 106,35% | 109,70% |

c. Lingkungan Kerja

DPLK bank **bjb** berkomitmen untuk menyediakan lingkungan kerja yang layak, aman, dan mendukung produktivitas pegawai sebagai bagian dari penerapan praktik ketenagakerjaan yang bertanggung jawab. Lingkungan kerja yang kondusif dipandang sebagai salah satu faktor penting dalam mendukung kinerja organisasi serta kesejahteraan pegawai. Dalam pelaksanaannya, DPLK bank **bjb** memastikan bahwa kegiatan operasional dilaksanakan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan kesehatan kerja, termasuk melalui penyediaan fasilitas kerja yang memadai serta penerapan kebijakan internal yang mendukung kenyamanan dan keamanan pegawai. Upaya yang dilakukan antara lain meliputi:

- 1) penyediaan sarana dan prasarana kerja yang sesuai dengan kebutuhan operasional;
- 2) penerapan standar keselamatan kerja dalam aktivitas perkantoran;
- 3) pengelolaan lingkungan kerja yang bersih, tertata, dan nyaman.

Selain itu, DPLK bank **bjb** juga berupaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan mendukung interaksi kerja yang profesional antar pegawai, sebagai bagian dari penguatan budaya organisasi. Lingkungan kerja yang aman dan sehat

merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kinerja sosial organisasi. Hal ini juga sejalan dengan SDG 8 (*Decent Work and Economic Growth*) yang menekankan pentingnya penyediaan lingkungan kerja yang layak dan aman. Dengan demikian, lingkungan kerja di DPLK bank **bjb** tidak hanya menjadi bagian dari pemenuhan kewajiban perusahaan, tetapi juga merupakan elemen penting dalam mendukung keberlanjutan organisasi melalui peningkatan kesejahteraan dan produktivitas pegawai.

d. Pelatihan dan Pengembangan

DPLK bank **bjb** menyadari bahwa pengembangan kompetensi pegawai merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung kinerja organisasi serta keberlanjutan kegiatan usaha. Oleh karena itu, perusahaan secara berkelanjutan melakukan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui berbagai program pelatihan dan pengembangan. Pelatihan yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing fungsi kerja, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan dana pensiun, investasi, manajemen risiko, kepatuhan, serta pelayanan kepada peserta. Selain itu, pengembangan kompetensi juga dilakukan untuk mendukung adaptasi terhadap perkembangan industri jasa keuangan, termasuk pemahaman awal mengenai konsep Keuangan Berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, program pelatihan dan pengembangan dapat mencakup:

- 1) pelatihan teknis sesuai bidang pekerjaan;
- 2) sertifikasi profesi di bidang investasi dan manajemen risiko;
- 3) workshop dan seminar yang relevan dengan industri;
- 4) pembelajaran internal dan berbagi pengetahuan antar pegawai;

| Indikator | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Jumlah Program Pelatihan | 13 | 4 | 9 |
| Jumlah Peserta Pelatihan | 4 | 2 | 4 |

Pelatihan dan pengembangan pegawai merupakan indikator penting dalam menilai komitmen organisasi terhadap peningkatan kapasitas sumber daya manusia. pelatihan dan pengembangan pegawai merupakan indikator penting

dalam menilai komitmen organisasi terhadap peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

3. Hubungan dengan Masyarakat

Kinerja sosial DPLK bank **bjb** juga mencakup dampak kegiatan usaha terhadap hubungan dengan masyarakat. Sebagai lembaga jasa keuangan, kontribusi terhadap masyarakat tidak selalu berbentuk kegiatan langsung, tetapi juga melalui peran dalam menyediakan layanan yang mendukung perencanaan keuangan jangka panjang.

a. Dampak terhadap Masyarakat

DPLK bank **bjb** memberikan kontribusi terhadap masyarakat melalui penyelenggaraan program pensiun yang mendukung perencanaan keuangan jangka panjang. Layanan ini memberikan manfaat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesiapan finansial di masa pensiun. Dari sisi dampak, kegiatan usaha DPLK bank **bjb** pada umumnya memberikan dampak positif, antara lain peningkatan pemahaman masyarakat terhadap program pensiun, kontribusi terhadap perencanaan keuangan jangka panjang, dan penyediaan layanan keuangan yang mendukung kesejahteraan peserta.

Sementara itu, dampak negatif dari kegiatan usaha relatif tidak signifikan mengingat karakteristik DPLK sebagai lembaga jasa keuangan yang tidak memiliki kegiatan operasional yang berdampak langsung terhadap masyarakat dalam skala luas. Hal ini sejalan dengan SDG 10 (*No Inequalities*) yang mendorong peningkatan akses terhadap layanan keuangan serta pengurangan kesenjangan melalui inklusi keuangan.

| Indikator | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------|------|------|------|
| Total Literasi | 24 | 25 | 73 |

b. Mekanisme Pengaduan Masyarakat

DPLK bank **bjb** menyediakan mekanisme pengaduan sebagai bagian dari layanan kepada peserta dan pemangku kepentingan. Mekanisme ini bertujuan untuk

menampung, menindaklanjuti, dan menyelesaikan keluhan yang berkaitan dengan layanan maupun pengelolaan kepesertaan. Pengaduan dapat disampaikan melalui kanal layanan yang tersedia, dan setiap pengaduan ditangani sesuai dengan prosedur yang berlaku. Data pengaduan masyarakat dalam tiga tahun terakhir disajikan sebagai berikut:

| Indikator | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------------------|------|------|------|
| Jumlah Pengaduan Diterima | 19 | 57 | 27 |
| Jumlah Pengaduan Diselesaikan | 19 | 57 | 27 |
| Persentase Penyelesaian (%) | 100% | 100% | 100% |

Penyelesaian pengaduan menjadi bagian dari komitmen DPLK bank **bjb** dalam menjaga kualitas layanan serta kepercayaan peserta. Mekanisme pengaduan merupakan bagian dari transparansi dan akuntabilitas organisasi dalam mengelola hubungan dengan pemangku kepentingan.

c. Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)

Pada periode pelaporan, pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di DPLK bank **bjb** masih bersifat terbatas dan belum difokuskan secara khusus pada program keberlanjutan yang terstruktur. Kegiatan TJSL yang dilakukan pada umumnya masih bersifat umum dan belum secara langsung dikaitkan dengan indikator Keuangan Berkelanjutan.

Sejalan dengan pengembangan penerapan Keuangan Berkelanjutan, program TJSL ke depan diharapkan dapat diarahkan untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk dalam bentuk kegiatan literasi keuangan sebagaimana telah tercantum pada poin a.

Dalam konteks global, kegiatan TJSL yang terarah dapat berkontribusi terhadap berbagai tujuan SDGs, khususnya dalam aspek sosial dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, peran DPLK bank **bjb** terhadap masyarakat pada periode pelaporan masih berada pada tahap awal, dengan fokus pada kontribusi melalui layanan utama serta penguatan arah pengembangan kegiatan sosial di masa mendatang.

4. Kinerja Lingkungan

a. Kinerja Lingkungan Hidup

Sebagai lembaga jasa keuangan yang kegiatan operasionalnya berbasis perkantoran, dampak langsung DPLK bank **bjb** terhadap lingkungan hidup relatif terbatas. Meskipun demikian, DPLK bank **bjb** tetap berkomitmen untuk mengelola penggunaan sumber daya secara efisien sebagai bagian dari penerapan prinsip keberlanjutan. Pendekatan yang dilakukan difokuskan pada pengelolaan operasional internal, khususnya dalam penggunaan energi, material, serta efisiensi sumber daya yang digunakan dalam kegiatan perkantoran. Dalam kerangka GRI 302 (Energy) dan GRI 303 (Water), organisasi tetap diharapkan mengungkapkan penggunaan sumber daya meskipun dampaknya tidak signifikan, sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas.

a) Biaya Lingkungan (*environmental management cost*)

Biaya terkait pengelolaan lingkungan di DPLK bank **bjb** mencerminkan pengeluaran yang secara tidak langsung mendukung efisiensi penggunaan sumber daya serta penerapan prinsip keberlanjutan dalam kegiatan operasional.

Sebagai lembaga jasa keuangan yang kegiatan operasionalnya berbasis perkantoran, DPLK bank **bjb** tidak memiliki biaya lingkungan yang bersifat langsung atau spesifik, seperti pengelolaan limbah industri atau pengendalian emisi. Namun, pengelolaan lingkungan kerja dilakukan salah satunya melalui pemeliharaan area perkantoran, termasuk ruang terbuka seperti taman kantor, yang mendukung kenyamanan serta kualitas lingkungan kerja secara keseluruhan.

Sebagai bagian dari unit kerja pendiri, pengelolaan fasilitas operasional, termasuk utilitas dan sarana pendukung lainnya, dilakukan secara terintegrasi dengan pendiri. Dengan demikian, biaya yang berkaitan dengan pengelolaan

lingkungan tidak dicatat secara terpisah sebagai pos khusus dalam laporan keuangan DPLK bank **bjb**, melainkan melekat dalam biaya operasional yang ditanggung oleh pendiri. Dengan demikian, meskipun biaya terkait pengelolaan lingkungan belum teridentifikasi sebagai komponen tersendiri, DPLK bank **bjb** tetap mengintegrasikan prinsip efisiensi dan kesadaran lingkungan dalam kegiatan operasional sebagai bagian dari penerapan keberlanjutan.

b) Penggunaan Material

Penggunaan material dalam kegiatan operasional DPLK bank **bjb** berkaitan dengan kebutuhan administrasi perkantoran, seperti kertas, alat tulis, serta perlengkapan kerja lainnya. Dalam pelaksanaannya, penyediaan material tersebut dilakukan secara terintegrasi dengan pendiri sebagai bagian dari dukungan operasional organisasi. Seiring dengan upaya penerapan keberlanjutan, penggunaan material fisik, khususnya kertas, relatif terbatas. Hal ini didukung oleh pemanfaatan sistem digital yang digunakan dalam proses administrasi, termasuk penggunaan **bjb** VirtualOffice untuk pengiriman memo dan korespondensi internal.

Pemanfaatan sistem tersebut memungkinkan proses komunikasi dan administrasi elektronik, sehingga dapat mengurangi kebutuhan penggunaan dokumen fisik dalam kegiatan operasional sehari-hari. Selain itu, DPLK bank **bjb** juga mendorong penggunaan material secara lebih efisien melalui optimalisasi penggunaan perlengkapan kerja, dan peningkatan kesadaran pegawai dalam penggunaan material secara bijak;

c) Penggunaan Energi dan Efisiensi Biaya Lingkungan

Penggunaan energi dalam kegiatan operasional DPLK bank **bjb** terutama berasal dari konsumsi listrik dan air yang digunakan untuk mendukung aktivitas perkantoran. Mengingat DPLK bank **bjb** merupakan bagian dari unit kerja pendiri, pengelolaan fasilitas operasional, termasuk penggunaan energi dan utilitas, terintegrasi dengan sistem yang dikelola oleh pendiri. Dengan

demikian, biaya yang berkaitan dengan penggunaan energi, seperti listrik dan air, tidak dicatat secara terpisah dalam laporan keuangan DPLK bank **bjb**, melainkan menjadi bagian dari biaya operasional yang ditanggung oleh pendiri.

Meskipun demikian, DPLK bank **bjb** tetap berupaya untuk mendukung efisiensi penggunaan energi melalui penerapan kebiasaan kerja yang lebih hemat sumber daya, antara lain penggunaan air secara bijak sesuai kebutuhan, penggunaan peralatan listrik secara efisien, optimalisasi penggunaan fasilitas kerja, dan dorongan untuk mengurangi penggunaan kertas melalui digitalisasi dokumen. Kampanye ini menjadi bagian dari upaya membangun kesadaran pegawai dalam pengelolaan sumber daya secara efisien, serta mendukung pembentukan budaya keberlanjutan di lingkungan kerja. Pendekatan ini dilakukan sebagai bagian dari langkah awal dalam mendukung pengelolaan lingkungan yang lebih berkelanjutan, meskipun pengukuran biaya lingkungan secara rinci belum dilakukan.

Upaya efisiensi energi yang dilakukan meliputi, penggunaan peralatan listrik secara efisien, pengaturan penggunaan listrik di luar jam kerja, dan peningkatan kesadaran pegawai. Upaya efisiensi energi ini merupakan langkah awal yang umum dalam mendukung SDG 13 (*Climate action*). Pada periode pelaporan ini, penggunaan energi terbarukan belum diterapkan dan masih difokuskan pada efisiensi operasional.

b. Kinerja Lingkungan Hidup (Dampak Langsung)

Sebagai lembaga jasa keuangan yang kegiatan operasionalnya berbasis perkantoran, DPLK bank **bjb** tidak memiliki aktivitas yang berkaitan langsung dengan eksploitasi sumber daya alam maupun kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak signifikan terhadap lingkungan hidup. Oleh karena itu, dampak lingkungan langsung yang dihasilkan dari kegiatan usaha pada periode pelaporan ini relatif terbatas. Dalam konteks tersebut, sebagian besar indikator kinerja lingkungan yang berkaitan dengan dampak langsung, seperti

keanekaragaman hayati, emisi, serta limbah dan efluen, belum menjadi aspek yang material dalam kegiatan operasional DPLK bank **bjb**. Dalam prinsip materiality pada GRI Standards, organisasi dapat menyatakan bahwa suatu aspek tidak material apabila tidak memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan maupun pemangku kepentingan. Pendekatan ini digunakan dalam penyusunan pengungkapan pada bagian ini.

Kegiatan operasional DPLK bank **bjb** yang berbasis perkantoran tidak menimbulkan dampak terhadap ekosistem maupun keanekaragaman hayati, serta tidak berada di wilayah konservasi atau area dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi. Selain itu, kegiatan operasional juga tidak menghasilkan emisi, limbah berbahaya, maupun efluen dalam skala signifikan, mengingat tidak adanya aktivitas produksi atau industri. Adapun limbah yang dihasilkan dari kegiatan operasional bersifat terbatas dan umumnya berupa limbah domestik perkantoran, yang pengelolaannya mengikuti mekanisme umum yang berlaku. Dengan karakteristik tersebut, tidak terdapat dampak lingkungan yang bersifat material yang timbul dari kegiatan usaha DPLK bank **bjb** pada periode pelaporan ini.

c. Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan

Sebagai lembaga pengelola dana pensiun, pengembangan produk dan/atau jasa keuangan berkelanjutan di DPLK bank **bjb** memiliki keterkaitan erat dengan pengelolaan investasi serta penyelenggaraan program pensiun yang berorientasi jangka panjang.

Dalam konteks ini, penerapan prinsip keberlanjutan tidak hanya dilihat dari inovasi produk baru, tetapi juga dari bagaimana pengelolaan dana dilakukan secara bertanggung jawab dengan mempertimbangkan risiko dan peluang jangka panjang. Meskipun belum terdapat produk atau portofolio yang secara spesifik dikategorikan sebagai berkelanjutan, DPLK bank **bjb** telah mulai mengidentifikasi peluang integrasi aspek ESG dalam pengelolaan investasi. Pendekatan ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam pengembangan produk dan strategi investasi di masa mendatang. Dalam kaitannya dengan tanggung jawab terhadap

produk dan jasa yang diberikan, DPLK bank **bjb** memastikan bahwa seluruh layanan yang diberikan kepada peserta telah melalui proses evaluasi dan pengendalian internal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, guna menjaga kualitas layanan serta perlindungan terhadap peserta.

Source: Website Bankbjb.co.id



TERIMA KASIH